

“Peranan Pemerintah Dalam Penanganan Banjir dan Genangan Air di Wilayah Sukarame Studi Kasus Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung”

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengertian bencana yang diringkaskan pada Undang-Undang No. 24 tahun 2007 umumnya rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu jalannya kehidupan seluruh masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam atau non alam serta faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, rusaknya lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Dalam konteks kebijakan penanggulangan bencana di Indonesia yang mengacu pada Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (UU24/2007), banjir bisa dikelompokkan sebagai salah satu jenis bencana alam. Banjir terjadi saat kondisi daratan digenangi oleh aliran air dalam volume berlebihan.

Sesuai hasil kajian yang dilakukan Wijaya (2002) diidentifikasi penyebab banjir ada dua yaitu: a) Berdasarkan biofisik mencakup curah hujan tinggi, karakteristik DAS yang responsive terhadap banjir, penyempitan saluran drainase, perubahan penutupan lahan. b) Berdasarkan sosial ekonomi dan budaya: Tidak tegasnya penegakan hukum, perilaku masyarakat yang kurang sadar akan lingkungan dan timpangnya pembangunan.

Yulielawati (2008), mengatakan (3) tiga faktor penyebab banjir yaitu:

1. Pengaruh aktivitas manusia yaitu

- a. Pemanfaatan daratan banjir yang digunakan untuk pemukiman industri.
- b. Penggundulan hutan dan yang kemudian mengurangi resapan pada tanah dan meningkatkan larian tanah permukaan, sehingga terjadi erosi yang mengakibatkan sedimentasi diterusan sungai yang kemudian mengganggu jalannya air.
- c. Pemukiman dan pembangunan di daerah daratan banjir dan pembuatan saluran air yang tidak direncanakan dengan baik yang mengakibatkan tidak lancarnya aliran sungai

dan menimbulkan banjir.

d. Membuang sampah sembarangan dapat menyumbat saluran air terutama di perumahan.

2. Peristiwa alam yang bersifat dinamis

a. Curah hujan yang tinggi

b. Terjadinya pembendungan atau arus balik yang sering terjadi di muara sungai atau pertemuan sungai besar.

c. Penurunan muka tanah atau amblesan yang dikarenakan pengambilan air tanah yang berlebihan sehingga menimbulkan muka tanah menjadi lebih rendah.

d. Pendangkalan dasar sungai karena sedimentasi yang cukup tinggi. (Silalahi & Harahap, 2021)

Penyebab yang Sifatnya Akibat Ulah Manusia

Ada beberapa kegiatan manusia yang menimbulkan dampak-dampak negatif pada lingkungan sekitarnya, di antaranya:

Budaya Masyarakat

Ada kelompok masyarakat yang memiliki kebiasaan tidak mendukung kebersihan. Misalnya saja kebiasaan membuang sampah tidak pada tempatnya sehingga pada saat hujan turun sampah-sampah tersebut menyumbat saluran-saluran drainase yang ada dan menimbulkan banjir pada rumah tinggal di bantaran sungai, dan lain-lain.

Pembuatan Gorong-Gorong yang Kekecilan

Pada sistem drainase perkotaan ada 2 (dua) jenis gorong-gorong, yaitu:

1. Gorong-gorong jalan

Gorong gorong ini dibangun oleh pemerintah daerah Gorong gorong ini diperlukan pada saat saluran drainase hendak melintas jalan kota, terutama pada perempatan jalan raya. Jumlahnya relatif tidak banyak.

2. Gorong gorong rumah

Gorong-gorong rumah dibangun di depan setiap rumah penduduk. Jumlahnya bisa ratusan ribu, sesuai dengan jumlah penduduk di kota tersebut. Gorong gorong ini dibangun oleh penduduk kota sehingga banyak yang dibangun ala kadarnya. Banyak gorong-gorong yang

Sedangkan menurut Kodoatie dan Sugiyanto (2002), faktor penyebab terjadinya banjir dapat diklasifikasikan dalam dua kategori, yaitu banjir alami dan banjir oleh tindakan manusia. Banjir akibat alami dipengaruhi oleh curah hujan, fisiografi, erosi dan sedimentasi, kapasitas sungai, kapasitas drainase dan pengaruh air pasang. Sedangkan banjir akibat aktivitas manusia disebabkan karena ulah manusia yang menyebabkan perubahan-perubahan lingkungan seperti: perubahan kon- disi Daerah Aliran Sungai (DAS), kawasan pemukiman di se- kitar bantaran, rusaknya drainase lahan, kerusakan bangunan, pengendali banjir, rusaknya hutan (vegetasi alami), dan perencanaan sistim pengendali banjir yang tidak tepat.

Sekarang ini banjir menjadi suatu permasalahan serius di Kota Bandar Lampung salah satunya di wilayah Kelurahan Waydadi Baru Kecamatan Sukarame. Karena hampir setiap tahun banjir selalu menimpa setiap wilayah di daerah ini apalagi ketika musim penghujan tiba. Pengaruh perubahan iklim saat hujan juga mempengaruhi peningkatan bencana hidrometeorologi ini. Dengan jumlah frekuensi kejadian yang cukup banyak, bencana ini memberikan dampak terhadap ekonomi maupun lingkungan masyarakat sekitar. Jika kondisi ini tidak cepat ditindaklanjuti, dikhawatirkan banjir yang terjadi akan menjadi lebih besar. Sehingga diharapkan adanya kesadaran masyarakat dan juga penanggulangan dari pemerintah setempat agar bencana tersebut tidak terulang Kembali ataupun menjadi lebih besar.

Intensitas curah hujan yang cukup tinggi merupakan salah satu kunci penyebab terjadinya banjir di kawasan Sukarame dan Way Dadi. Selama musim hujan, sehingga dapat menyebabkan timbulnya genangan air di jalan-jalan dan pemukiman penduduk. Pada lain hal, intensitas hujan yang deras akan menyebabkan air hujan sulit mengalir dengan lancar ke sistem drainase, sehingga air hujan menumpuk dan membanjiri lingkungan sekitarnya. Kurangnya sistem drainase yang baik pula menjadi penyebab terjadinya banjir di kawasan Sukarame dan Way Dadi.

Selain hal tersebut faktor lain yang menjadi permasalahan yaitu, kesadaran yang rendah dalam membuang sampah pada tempatnya juga menjadi penyebab banjir di kawasan tersebut. Sampah yang dibuang secara sembarangan dapat menyumbat saluran pembuangan air, maka

berakibat air hujan akan sulit mengalir ke selokan dengan mudah dan lancar. Selain hal itu, sampah yang menyumbat juga bisa menyebabkan terjadinya banjir yang disebabkan oleh air limbah atau banjir rob.

Urbanisasi yang terjadi di perkotaan membawa beberapa perubahan terhadap topografi dan tata kota. Pembangunan bagi perkotaan memperluas area kedap air (impermeable) dengan pembangunan gedung-gedung, jalanan aspal, parkir, dan lain-lain yang membuat berkurangnya peresapan air hujan ke dalam tanah. Bila pembangunan perkotaan tersebut tidak direncanakan secara hati-hati, akan timbul beberapa masalah dalam perkotaan. Salah satunya adalah banjir yang terjadi di beberapa kota besar di Indonesia. (Syarifudin, 2017)

Drainase adalah pembuangan massa air secara alami atau buatan dari permukaan atau bawah permukaan dari suatu tempat (Suripin, 2004). Drainase termasuk salah satu unsur dari prasarana umum yang dibutuhkan masyarakat kota dalam rangka menuju kehidupan kota yang aman, nyaman, bersih dan sehat. Prasarana drainase berfungsi sebagai pengendalian kebutuhan air permukaan dengan tindakan untuk memperbaiki daerah genangan air dan banjir. Kegunaan saluran drainase adalah agar tidak ada kumpulan air tanah, menurunkan permukaan air tanah pada tingkat yang ideal, mengendalikan erosi tanah, mengurangi kerusakan jalan dan bangunan di sekitar daerah tersebut.

Masalah-masalah banjir di perkotaan pada umumnya disebabkan oleh kurang efektifnya sistem drainase perkotaan. Pengembangan drainase perkotaan kadang-kadang sulit dilaksanakan dikarenakan keadaan topografi yang datar, pengembangan kota di dataran banjir, tingkat hujan yang tinggi dari daerah kedap air yang luas, dan kerusakan/hilangnya daerah penampungan.

Menurut Michael E. Kraft & Scott R. Furlong

"Public policy is what public officials within government, and by extension the citizens they represent, choose to do not to do about public problems. Public problems refer to conditions the public widely perceives to be unacceptable and that therefore require intervention (Kebijakan publik adalah apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pejabat publik dalam pemerintahan atas rakyat yang diwakili. Permasalahan publik merujuk pada setiap hal yang tidak dapat diatasi oleh masyarakat secara luas dan oleh karena itu memerlukan intervensi dari pemerintah)." (Mustari & IP, 2015)

Hampir semua kota di Indonesia mengalami bencana banjir ketika musim hujan. Peristiwa tersebut setiap tahun berulang kembali, namun permasalahan ini belum terselesaikan, bahkan cenderung meningkat. Banjir adalah peristiwa yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan, sedangkan genangan adalah peristiwa ketika kawasan dipenuhi air karena tidak ada drainase yang mematus air tersebut keluar kawasan (Sobirin, 2007). Dalam mengatasi masalah banjir ini diperlukan suatu sistem drainase yang baik, dengan didukung berbagai aspek perencanaan yang terkait di dalamnya. Hal ini terjadi karena pada jalan belum terdapat sistem drainase yang memadai, jika intensitas hujan tinggi kemungkinan terjadi banjir/genangan air cukup besar.

Berdasarkan pencatatan sejarah kejadian bencana pada situs dibi.bnpb.go.id, bencana banjir merupakan bencana yang paling sering terjadi di Kota Bandar Lampung. Sepanjang tahun 2010 hingga tahun 2019 telah terjadi 14 kali banjir dari 26 total kejadian bencana di Kota Bandar Lampung. Pada umumnya banjir yang terjadi di Kota Bandar Lampung umumnya bersifat genangan dengan tinggi maksimal sekitar dua meter dan tidak separah yang terjadi di kota besar lainnya seperti Jakarta. Meskipun tidak begitu parah, akan tetapi banjir yang terjadi sangat menghambat aktivitas masyarakat, banyak sarana dan prasarana yang tidak dapat digunakan, dapat menimbulkan berbagai penyakit pasca banjir, menimbulkan kerugian harta benda bahkan dapat menelan korban jiwa. Secara tidak langsung, banjir juga dapat menghambat kegiatan perekonomian di suatu wilayah.

Perencanaan Sistem Drainase Setiap perkembangan kota harus diikuti dengan perbaikan sistem drainase. Drainase perkotaan harus terpadu dengan sanitasi sampah, pengendalian banjir kota, dan sebagainya. Tujuan diadakannya drainase adalah suatu usaha pengurangan debit banjir, oleh karena itu perencanaannya difokuskan pada identifikasi, analisis dan rekomendasi perbaikan atau pembuatan saluran drainase di daerah perkotaan. Identifikasi dilakukan untuk mengetahui secara rinci penyebab banjir, inventarisasi saluran drainase, pengukuran tinggi genangan banjir, waktu genangan banjir, dan kerugian ekonomi baik material maupun non material yang disebabkan oleh banjir tersebut. Analisis dilakukan untuk mengetahui dan menghitung besarnya kerugian ekonomi yang disebabkan banjir serta hubungannya dengan kapasitas drainase yang ada di perkotaan. Rekomendasi baik rekomendasi untuk perbaikan dan pembuatan jaringan drainase yang baru adalah hasil akhir dari studi yang didasarkan pada kegiatan identifikasi dan dianalisis. (Dirwansyah, 2014)

Peran menurut Soekanto (2009:212) adalah proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.

Sedangkan menurut Merton dalam Raho (2007:67) mengatakan bahwa peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. (Peran, 2018)

Dinas Pekerjaan Umum memiliki peran dalam pemeliharaan dan pengoperasian peralatan pengendalian banjir berupa pemeliharaan drainase dari sampah, sedimen, pemeliharaan drainase juga dilaksanakan oleh masyarakat maupun relawandan pengoperasian pompa dan pintu air. (Wulandari, 2022)

Melakukan peran berupa sosialisasi kepada masyarakat terkait dilarangnya membuang sampah di saluran air yang dilaksanakan secara rutin di kelurahan dan kecamatan, sehingga pengendalian banjir dapat terlaksana dengan baik dengan tidak adanya sampah di saluran air.

Wilayah Sukarame di Bandar Lampung adalah tempat langganan banjir dan genangan air. Ini bukanlah kejadian pertama, melainkan satu dari sekian banyak peristiwa serupa yang seringkali terjadi di wilayah tersebut. Warga Sukarame yang sudah terbiasa dengan fenomena ini mulai merasa frustrasi dan bertanya-tanya tentang kurangnya perhatian dan peran pemerintah, terutama Dinas Pekerjaan Umum (PU), dalam pencegahan dan penanganan banjir serta genangan air di daerah mereka, khususnya dalam hal sistem drainase.

Sejak beberapa tahun terakhir, warga Sukarame sudah sering mengalami dampak buruk banjir dan genangan air. Pada musim hujan, genangan air seringkali mencapai ketinggian yang mengganggu aktivitas sehari-hari warga. Meskipun mereka telah mengajukan keluhan dan permintaan kepada pemerintah setempat, terutama kepada Dinas PU, upaya untuk memperbaiki situasi ini sepertinya terasa lamban dan kurang efektif.

Salah satu masalah yang paling mencolok adalah sistem drainase yang buruk di wilayah Sukarame. Saluran-saluran air yang ada sudah lama tidak pernah diperbaiki atau ditingkatkan, sehingga tidak mampu menampung volume air hujan yang cukup besar. Air hujan yang seharusnya dialirkan dengan baik ke sungai terdekat justru seringkali menggenangi jalan raya

dan perumahan warga. Hal ini mengakibatkan kerusakan pada infrastruktur dan mengganggu mobilitas masyarakat.

Kurangnya perhatian pemerintah, terutama Dinas PU, dalam memperbaiki sistem drainase dan mencegah banjir juga tercermin dalam kurangnya pemeliharaan dan pembersihan sungai-sungai yang ada di wilayah Sukarame. Sampah dan tumpukan lumpur seringkali menyumbat aliran sungai, menyebabkan sungai meluap saat hujan deras dan membanjiri pemukiman warga.

Selain itu, pembangunan di wilayah Sukarame juga perlu diawasi dengan lebih baik. Sebagian besar pembangunan yang terjadi seringkali tidak memperhatikan aspek tata ruang dan drainase yang memadai. Tanah-tanah yang seharusnya berfungsi sebagai resapan air hujan telah digunakan untuk pembangunan, menyebabkan peningkatan risiko banjir.

Masyarakat Sukarame berharap agar pemerintah, terutama Dinas PU, lebih memperhatikan permasalahan ini. Mereka membutuhkan investasi dalam perbaikan sistem drainase yang sudah usang, pembersihan sungai secara berkala, dan penegakan aturan tata ruang yang lebih ketat. Dengan tindakan yang lebih proaktif dari pemerintah, warga Sukarame berharap dapat mengurangi risiko banjir dan genangan air yang sering mengganggu kehidupan sehari-hari mereka, serta menjaga wilayah mereka agar lebih aman dan nyaman untuk ditinggali.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah rumusan masalah untuk penelitian dengan judul "Peranan Pemerintah Dalam Penanganan Banjir dan Genangan Air di Wilayah Sukarame: Studi Kasus Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung":

1. Bagaimana kondisi banjir dan genangan air di wilayah Sukarame, Kota Bandar Lampung, selama beberapa tahun terakhir?
2. Apa peran Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Bandar Lampung dalam penanganan banjir dan genangan air di wilayah Sukarame?
4. Apa hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh Dinas PU Kota Bandar Lampung dalam melaksanakan perannya dalam penanganan banjir dan genangan air di Sukarame?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian "Peranan Pemerintah Dalam Penanganan Banjir dan Genangan Air di Wilayah Sukarame: Studi Kasus Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung" adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kondisi aktual banjir dan genangan air yang terjadi secara berkala di wilayah Sukarame, Kota Bandar Lampung, selama beberapa tahun terakhir.
2. Untuk mengetahui peran yang telah dijalankan oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Bandar Lampung dalam penanganan dan mitigasi banjir serta genangan air di Sukarame.
3. Untuk mengevaluasi efektivitas tindakan yang telah diambil oleh Dinas PU Kota Bandar Lampung dalam mengatasi masalah banjir dan genangan air di Sukarame.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat bagi Pemerintah Kota Bandar Lampung: Penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kondisi banjir dan genangan air di Sukarame dan evaluasi terhadap peran Dinas PU. Hal ini dapat menjadi dasar untuk perbaikan kebijakan, alokasi anggaran yang lebih efektif, dan langkah-langkah konkret dalam mengatasi masalah banjir.
2. Manfaat bagi Masyarakat Sukarame: Hasil penelitian akan membantu masyarakat Sukarame untuk mengerti lebih lanjut tentang upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah dalam penanganan banjir dan genangan air, serta memberikan wawasan tentang harapan mereka yang dapat diperhatikan oleh pemerintah.
3. Manfaat bagi Penelitian Selanjutnya: Penelitian ini dapat menjadi acuan bagi penelitian-penelitian selanjutnya tentang mitigasi bencana banjir dan genangan air, baik di Sukarame maupun di wilayah lain dengan masalah serupa.

DAFTAR PUSTAKA

- Dirwansyah, S. (2014). Analisis Kerugian Akibat Banjir di Bandar Lampung. *Jurnal Teknik Sipil UBL*, 5(1).
- Mustari, N., & IP, S. (2015). KEBIJAKAN PUBLIK. *Yogyakarta: Leutikaprio*.
- Peran, D. P. U. (2018). *PERAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TERHADAP PENGENDALIAN BANJIR DI SAMARINDA*.
- Silalahi, B., & Harahap, M. E. (2021). *Penyebab Potensi Banjir di Daerah Aliran Sungai Deli Kota Medan*. Penerbit Adab.
- Syarifudin, A. (2017). *Drainase Perkotaan Berwawasan Lingkungan*. Penerbit Andi.
- Wulandari, K. (2022). Peran Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dalam Pengendalian Banjir Di Kota Surakarta. *Solidaritas: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 6(1).